

## Daftar Pustaka

- Aprianti, S., Arifin Zainal, K., & Maryana, E. (2017). Kesiapan Implementasi PSAP Nomor 13 Pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 1(kesiapan implementasi PSAP No 13), 9–14.
- Azwar. 2010. *Masukan terdiri dari Sumber Daya Manusia, dana, sarana,dan metode*. Jakarta: Alfabeta
- Ayuningtyas, N., & Pujiningsih, S. (2019). Perubahan Organisasi Puskesmas dan Peran Akuntansi dalam Perspektif Teori Institusional. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(3), 190–202.
- Cahyadi, G. F. 2017. Evaluasi Persyaratan Substantif, Teknis, dan Administratif Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus pada Sebelas Puskesmas di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB)*.5(2)
- Djam'an Satori & Aan Komariah. 2017. *Penentuan Informan Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Alfabeta
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faustina. (2014). .Pengaruh Kompetensi dan Komitmen pada Tugas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Dharma Deli Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 14(1). 49-63.
- Firdausi, Y. R., & Pujaningsi, S. (2018). Pemaknaan Perubahan Puskesmas X Menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 92–107.
- Halim, Abdul 2014 *Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta:Salemba Empat
- Harmoko. 2018. *Pengoptimalan pelayanan publik*. Jakarta: Alfabeta
- Hasna. (2019). Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Rsud Undata Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Akuntansi Katalogis*, 4(kesiapan BLUD), 143–151.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan. (2020). Jumlah Puskesmas BLU/D. <https://m.merdeka.com/2021/02/19/jumlah-puskesmas-BLUD>. Diakses pada 4 Maret 2021 pukul 14.00

- Imawan, M. R., & Amirya, M. (2016). Analisis Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Untuk Menerapkan PPK-BLUD ( Studi Kasus pada RSUD X Kabupaten Y ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 4, 1–18.
- Kabupaten Musi Banyuasin (2018). Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 tentang Standar Tenaga Kerja Pada Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin.
- Listyawati, N., & Sholihin, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Kesiapan dan Dukungan Stakeholders Terhadap Perubahan Status Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (Studi Pada Puskesmas-Puskesmas Di Kabupaten Klaten). *Jurnal Kebijakan Publik*, 53(9), 1689–1699.
- Mahmudi 2016:141 *Penilaian Kinerja Keangan dengan rasio Eetiitas Pendapatan*. Jakarta, Alfabeta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. ( 2004). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Terselenggaranya UKP dan UKM Bagi Puskesmas
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. ( 2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas Sebagai BLUD. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. ( 2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas Sebagai BLUD. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Sekretariat Negeri
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Sekretariat Negeri
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. ( 2004). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2005) .Peraturan Manteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menujuakrual
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. ( 2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 488 Tahun 2016. Data Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Negeri
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Notoatmodjo. (2012). *Teknik Analisis data*. Jakarta. Alfabeta
- Rawung, L. C., & Sholihin, M. (2017). Does Extended Autonomy of Public Service Agency Lead to A Better Performance? A Case of Indonesian Community Health Centers. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 231–248.
- Rawung, L. C. 2016. Evaluasi Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Puskesmas BLUD Kota Balikpapan). *Jurnal Online Program Magister Akuntansi UGM*.1-20.
- Republik Indonesia.(2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perbendaharaannegara. Jakarta: Sekretariat Negera.
- Republik Indonesia.(2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2005 Tentang PendanaanPuskesmas. Jakarta: Sekretariat Negera.
- Republik Indonesia.(2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negera.
- Republik Indonesia.(2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menujuakrual
- Republik Indonesia (2003).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negera.
- \_\_\_\_\_ (2004).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaannegara. Jakarta: Sekretariat Negera..
- \_\_\_\_\_ (2014).. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negera..
- \_\_\_\_\_ (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Revisi atas UU No. 23 Tahun mengenai Otonomi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negera..

\_\_\_\_\_ (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor  
13 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD

\_\_\_\_\_ (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU

- Republik Indonesia (2016). Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2016. Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 31 Oktober 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229. Jakarta.
- Subarsono, A. G. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian, Jenis Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data*. Jakarta:Alfabeta
- Suhartono, S., Suwandi, M., & Bulutoding, L. (2019). Kesiapan Implementasi Psap Nomor 13 Pada Instansi Badan Layanan Umum (BLUD) DiKota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3017, 210–230.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ Tanggal 10 September 2008
- Tim Penyusunan 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Zakiy, M. 2016. Analisis Persyaratan Substantif, Teknis dan Administratif dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Studi pada 10 Puskesmas di Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB)*. 4(2).

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**